
IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) DI KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

Shantrya Dhelly Susanty^{1*}, Fitria Fatma²

¹Sarjana Kesehatan Masyarakat , universitas Fort de Kock

*Email Korespondensi: shantryadhelly@fdk.ac.id

² Sarjana Kesehatan Masyarakat , universitas Fort de Kock
email: fitriafatma@fdk.ac.id

Submitted :26-12-2022, Reviewed: 13-01-2023, Accepted:20-01-2023

DOI: <http://doi.org/10.22216/jen.v8i1.1890>

ABSTRAK

The Toddler Family Development Program is an extension activity for parents and other family members to nurture and form good child growth and development. The research uses qualitative methods with a case study approach, namely looking at the input components, processes and outputs of policy implementation. . Where informants were displaced from 13 people who were employees of the Agam Regency office, PKB, and Agam Regency BKB Cadres. Research activities are carried out from July–August 2022. Data collection techniques in in-depth interviews, and document review. Process data by reducing, presenting and drawing conclusions. The results of the research in terms of BKB policy inputs have been carried out, infrastructure has been equipped, but there are problems in human resources and lack of participation and cadres or members of the BKB and the unavailability of a budget for the implementation of BKB activities. As a result of the process of implementing activities, the presence of BKB members is said to be still low. The output part of the policy is a problem because all activities are focused on handling the pandemic so that the implementation of activities is said to be not running optimally. The conclusion of the study states that the implementation of the Agam Regency toddler family development policy is said to have not run optimally so that it is expected to evaluate toddler family development activities

Keywords: Policy, Toddler Family Development

ABSTRAK

Program Bina Keluarga balita adalah kegiatan penyuluhan untuk orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk mengasuh dan membentuk tumbuh kembang anak yang baik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu melihat komponen *input*, proses dan *output* implementasi kebijakan. Dimana Informan terdiri dari 13 orang yang merupakan pegawai dinas Kabupaten Agam, PKB, dan Kader BKB Kabupaten Agam. Kegiatan Penelitian dilakukan mulai Juli–Agustus 2022. Teknik pengumpulan data secara wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Olah data dengan melakukan mereduksi, menyajikan dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian segi *input* kebijakan BKB sudah telah dijalankan, sarana prasarana telah dilengkapi, namun terdapat masalah pada sumber daya manusia dan kurangnya partisipasinya dan kader ataupun anggota BKB dan belum tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan BKB. Hasil proses pelaksanaan kegiatan, kehadiran anggota BKB dikatakan masih rendah. Bagian *output* kebijakan terdapat masalah disebabkan seluruh kegiatan di fokuskan ke penanganan pandemi sehingga pelaksanaan kegiatan di katakan tidak berjalan maksimal. Kesimpulan dari

LLDIKTI Wilayah X

40

penelitian menyatakan implementasi kebijakan bina keluarga balita Kabupaten Agam di katakan belum berjalan secara maksimal sehingga di harapkan melakukan evaluasi kegiatan Bina Keluarga Balita , diharapkan dapat menjalankan program dengan maximal dan menjalankan kegiatan BKB ini dan bisa menjadi alernatif untuk menurunkan kejadian stunting .

Kata Kunci : Kebijakan, Bina Keluarga Balita

PENDAHULUAN

Program Bina Keluarga Balita (BKB) penting untuk meningkatkan ketahanan keluarga khususnya dalam peran mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak balita (BKKBN, 2018). dengan tujuan pendidikan agar menjadikan “Anak Indonesia Sehat, Cerdas dan Berakhlak Mulia” dengan berdimensi holistik.

Salah satu tujuan Bina keluarga balita adalah untuk menurunkan Stunting , menurut jurnal Rohayati dkk tahun 2021 mengatakan bahwasanya Kondisi tinggi badan/ usia terbukti tidak berhubungan dengan perkembangan sosialisasi anak usia 0-24 bulan (p value 0,116; C 0,363; CI 95%). Monitoring dan edukasi kepada kader posyandu dan keluarga sangat penting agar stimulasi gizi dan perkembangan anak dapat dilakukan sedini mungkin.

Kebijakan Merupakan kumpulan dari aktifitas pemerintah untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sesuai Undang-Undang No.59 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat 1 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunana keluarga dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunana keluarga melalui pembinaan ketahanann dan kesejahteraan keluarga. (Rezillah, Siswoyo, and Nariyah 2018).

Berdasarkan peraturan kepala bidang nasional nomor 12 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa bina keluarga balita atau BKB adalah layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spritual sosial dan moral untuk menuju sumber daya yang berkualitas dalam

rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-kb bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

Dari penelitian Diah Wahyu Larasati (2011) menjelaskan bahwa BKB Sangat berperan dalm mengubah pola asuh orang tua dalam mengembangkan akhlak anak dilihat dari adanya perubahan positif pada sikap kebiasaan akhlak anak melalui pola asuh yang di terapkan oleh orang tua namun respon negatif dari anggota keluarga yang membuat peserta BKB enggan untuk mempraktekkan ilmu yang sudah di dapatnya nya di BKB (Larasati 2011).

Sedangkan dari hasil penelitian Fitri Wahyuningsih dkk tahun 2020 menjelaskan bahwa fungsi bina keluarga balita sangat efektif untuk meningkatkan pola asuh orang tua dalam mengasuh anak balita nya sebagaimana umur balita adalah umur golden priode sehingga adanya BKB sangat berguna bagi ibu balita dengan adanya kebijakan sdm dan sarana prasarana mampu meningkatkan partisipasi orang tua dalam mengikuti bina keluarga balita demi menghasilkan bibit unggul untuk masa depan anak kedepannya (Wahyuningsih, Wahyuni, and Widiyanto 2020).

Dari hasil penelitian Santi Hariani dkk (2019) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan BKB sudah didukung oleh kebijakan baik dari peraturan presiden, menteri, undang undang serta peraturan walikota namun karena masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan BKB serta pelaksanaan di lapangan yang masih kurang didukung oleh sarana prasarana yang kurang memadai untuk pelaksanaannya membuat capaian program BKB di katakan belum memenuhi target (Hariani, Masrul, and Elytha 2019).



Dari data observasi awal berupa capaian kinerja data menunjukkan bahwa hasil di bidang BKB ada sebanyak 131 kelompok BKB yang melapor sebanyak 126 kelompok BKB, dari 131 kelompok BKB yang rutin mengikuti kegiatan BKB hanya 64 kelompok BKB, jumlah anggota kelompok BKB sebanyak 3353 orang dengan persentase keluarga hadir pertemuan BKB sebanyak 66,23% (DALDUK, 2021).

Dari hasil dari wawancara dengan pihak BKKBN Kabupaten Agam menyebutkan bahwa kegiatan untuk pelaksanaan program tribina khususnya BKB terhalang karena pandemi saat ini. Sehingga kegiatan untuk melakukan pembinaan tidak maksimal di lakukan, selain alasan tersebut pihak informan juga menyebutkan alasan kenapa kegiatan BKB ini belum berjalan karena kurangnya tenaga ahli yang paham IT untuk mengupload data tentang BKB di daerah daerah. sehingga untuk melihat tingkat keberhasilan kegiatan tersebut cukup terkendala, cakupan daerah yang sangat besar dan berjarak jauh membuat kegiatan yang di lakukan di masa pandemi saat ini tidak berjalan maksimal. Segi dana informan mengatakan juga terkendala karena kurangnya dana operasional yang di peruntukkan untuk pelaksanaan BKB sedangkan untuk bisa di laksanakan nya program BKB ini pihak dinas harus membayar kader dalam pelaksanaannya.

Sarana prasarana kegiatan informan mengatakan di setiap nagari yang memiliki kampung KB sudah di lengkapi alat permainan edukatif untuk anak serta prasarana untuk mencatat tumbuh kembang anak berupa KKA sudah tersebar merata. Segi waktu kegiatan BKB ini di lakukan setiap sekali sebulan di tiap kelompoknya. Untuk perencanaan kegiatan bahwa program ini di atur dan di rencanakan oleh kepala Dinas BKKBN untuk dilaksanakan sebagai pemantau tumbuh kembang pada anak terutama pada balita, selanjutnya kegiatan ini di atur untuk dilaksanakan dengan dibentuk oleh kader bina keluarga balita, selanjutnya setelah di bentuk lalu di lakukan pelaksanaan oleh kader bina keluarga balita yang berperan sebagai penyuluh di bantu oleh PKB (penyuluh keluarga berencana).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggambarkan kebijakan program bina keluarga balita di dinas DALDUK KB PP PA Kabupaten Agam yang terdiri dari komponen input (kebijakan, kebijakan, sdm, dana, sarana dan prasarana, kewenangan) proses (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) dan output (berjalan atau tidaknya kebijakan tentang program bina keluarga balita di dinas DALDUK KB PP PA Kabupaten Agam). Jumlah kelompok bidang pengendalian penduduk dengan program bina keluarga balita sebanyak 131 kelompok dengan kelompok BKB rutin dalam melaksanakan kegiatan sebanyak 64 kelompok. Informan pada penelitian ini adalah sebanyak 13 orang. penelitian ini di lakukan pada bulan Juni - Juli tahun 2022 bertempat di dinas DALDUK KBPP PA Kabupaten Agam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Input Kebijakan

Kebijakan sudah dijalankan sesuai Peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2018 terkait pelaksanaan kegiatan BKB hi sehingga kebijakan mampu mengendalikan pola asuh pada orang tua balita namun kebijakan ini saat ini tidak berjalan maksimal karena kurangnya dukungan terkait pelaksanaan .

Sejalan dengan penelitian Yasbianti, Terkait Pelaksanaan program BKB holistik terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD sudah didukung oleh kebijakan baik dari peraturan presiden, menteri, Undang Undang serta peraturan walikota dan SKPD terkait. Namun kendala Sumber daya manusia masih kurang pada pengelola BKB dan pelaksana dilapangan serta sarana prasarana dan dana untuk kelompok BKB yang masih rendah dibandingkan dan pelaksanaan PAUD dan posyandu. (Hariani, Masrul, and Elytha 2019).

Penelitian yang sama terkait Kebijakan Program Bina Keluarga Balita di Balai Penyuluhan DP3KB Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yaitu belum optimalnya



komunikasi dalam Program Bina Keluarga Balita, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya dana dalam Program Bina Keluarga Balita di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes (Rezillah, Siswoyo, and Nariyah 2018).

Penelitian berbeda dari ertino bagas, Menunjukkan bahwa pelaksanaan program BKB di Desa Nogosari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan program sudah berjalan dengan baik setelah 7 bulan tidak dilaksanakan serta perlu diadakannya penanganan khusus terhadap beberapa masalah tertentu seperti mengadakan pelatihan intensif bagi para kader dan pemenuhan APE (Mojokerto and Timur 2021).

Menurut asumsi peneliti bahwa pelaksanaan program bina keluarga balita telah di jalan dikabupaten agam dan di katakan berhasil pelaksanaanya di beberapa kecamatan yang memiliki kelompok BKB namun kegiatan bina keluarga balita saat ini tidak berjalan sesuai dengan peraturan kepala BKKBN no 12 tahun 2018 terkait pembentukan dan pengaktifan kembali kegiatan bina keluarga balita hal ini di karenakan beberapa kendala yang membuat kebijakan ini tidak berjalan baik dari komponen input yang terdiri dari dana sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang mana komponenen ini merupakan komponen pendukung untuk pelaksanaan kebijakan di katakan lebih baik kedepannya.

Sumber daya manusia

Dukungan sudah di katakan baik karena kader mampu melaksakan tugas mereka sesuai tugas dan fungsi masing, terkait penggunaan IT di wilayah kerja kabupaten agam sudah di katakan baik namun hanya terkndala sinyal yang kurang bagus di bebrapa wilayah kerja hal lain yang membuat kader tidak aktif mengikuti kegiatan kurangnya pengetahuan kader serta motivasi dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2018 menjelaskan bahwa kelompok BKB adalah wadah kegiatan penyuluhan bagi orang tua balita dan anggota keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yang bantu oleh kader dalam melaksanakan kegiatan bina

keluarga balita yang mana kader berasal dari seluruh masyarakat yang menjalankan kegiatan secara ikhlas dalam melakukan pembinaan dan telah melakukan penyuluhan kepada orang tua dan kelompok BKB (BKKBN, 2016).

Hal ini sesuai dengan penelitian wijayanti (2018) yang mengatakan bahwa kendala terkait bkb holistik integratif antara lain rendahnya komitmen antar sektor terkait mitra kerja dalam memberikan pelayanan yang baik, Rendahnya Kualitas Kader dan PLKB sehingga pemahaman tentang BKB masih kurang selanjutnya kesadaran orang tua untuk bisa aktif dalam kegiatan bina keluarga balita yang masih kurang sehingga membuat kebijakan terkait BKB ini terkendala disaat pelaksanaan (Wijayanti 2018).

Sejalan dengan penelitian wijayanti, Kenyataannya kader yang terlibat dalam kegiatan BKB secara kuantitatif hanyalah terbatas pada segelintir individu yang telah lama aktif dalam sejumlah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Padahal dari sisi jumlah masih banyak ibu-ibu ataupun remaja di Kelurahan Balandai yang dari sisi kualitas mampu untuk menjadi motivator dan inisiator bagi terselenggaranya Program Bina Keluarga Balita (BKB) ini Mengemukakan bahwa partisipasi orangtua dalam pelaksanaan kegiatan BKB tergolong tinggi terutama pada partisipasi orangtua dalam mengisi daftar hadir pertemuan BKB (Djabbar 2018).

Seiring dengan peneltian djabbar dan wijayanti, penelitian mojokerto menjelaskan Partisipasi orangtua dalam memberikan solusi terhadap pelaksanaan kegiatan bina keluarga balita rendah dan juga adanya hubungan yang kuat dan searah antara peran kader dengan partisipasi orangtua dalam dalam pelaksanaan kegiatan BKB di Desa Mangliawan (Mojokerto and Timur 2021).

Penelitian berbeda menjelaskan bahwa program BKBHI yang dikolaborasikan dengan program PAUD Kober Ceria mendapat respon positif baik itu dari pemerintahan Kelurahan Setiajaya, penyuluh/kader ataupun warga Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya (Yasbiati 2018).

Menurut asumsi peneliti, berdasarkan pengamatan dilapangan sumber daya manusia

LLDIKTI Wilayah X



bina keluarga balita wilayah agam dikatakan masih kurang, hal ini di karenakan motivasi kader dalam melaksanakan kegiatan setiap bulannya serta belum adanya pembinaan bagi kader sehingga Kader yang dikatakan paham dan terlatih sebagai kader bkb belum memadai sesuai ketentuan yang ada karena syarat sebagai kader dalam kegiatan bina keluarga balita adalah kader yang terlatih dan sudah mengikuti pembinaan sedangkan selama kegiatan dijalankan dukungan terkait pelaksanaan pembinaan kader belum ada.

Anggaran

Untuk dukungan anggaran hanya berpatokan ke APBN Dan APBD namun untuk penggunaan saat pandemi sehingga anggaran tersebut di alihkan ke penanganan covid.untuk mengatasinya maka kader BKB di ambil dari kader Posyandu sehingga untuk kegiatan bisa kita laksanakan dengan meminimalisir pengeluaran anggaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yulia suarni dewi (2021) yang mana menjelaskan bahwa faktor yang membuat kader tidak berjalan secara efektif adalah kurang anggaran terkait pelaksanaan kegiatan bina keluarga balita yang di gunakan untuk pelaksanaan kegiatan bina keluarga balita setiap bulannya, anggaran yang dibutuhkan terkait anggaran pelatihan kader disetiap kecamatan dan juga dana honor yang di berikan kepada kader yang tidak sesuai dengan kinerja kader (Yuliarni, 2021).

Pendanaan masih belum ada secara intensif terutama bagi para kader. Hal ini terjadi karena masih belum adanya Undang-Undang terkait yang menyatakan dana intensif dalam pelaksanaan program seperti ini(Mojokerto and Timur 2021).

Menurut asumsi peneliti, untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan bina keluarga balita maka anggaran terkait pelaksanaan harus disediakan, karena dalam pelaksanaan kegiatan kader melaksanakan kegiatan mereka membutuhkan anggaran guna pendukung pelaksanaan BKB setiap bulannya setidaknya disediakan anggaran terkait honor kader yang sudah menjalankan tugas dan

anggaran pelatihan kader dalam meningkatkan pengetahuan mereka dalam membina keluarga balita nantinya.

Maka untuk memperbaiki pelaksanaan kita harus mampu memperbaiki anggaran pendukung kegiatan bina keluarga balita saat ini agar pelaksanaan kebijakan bisa di laksanakan sesuai dengan aturan yang ada dengan semangat kerja dari kader yang mampu melaksanakan tugas sesuai dengan upah yang mereka terima setelah melaksanakan kegiatan .

Sarana dan prasana

Untuk dukungan sarana dan prasarana berupa kepemilikan APE, BKB kit, KKA belum lengkap di setiap kelompok BKB yang ada di setiap kecamatan.

Menurut Peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2018 pasal 25 dan 26 menjelaskan bahwa sarana yang harus ada di kelompok BKB berupa materi penyuluh seperti lembar balik,poster lipat,serta kantong wasiat sedangkan media BKB seperti alat permainan edukatif, dongen dan cerita serta musik dan lagu. Prasarana penyuluhan adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya kegiatan penyuluh yang berkaitan dengan BKB (BKKBN, 2016).

Menurut peneltian terkait sarana dan prasarana, Pelaksanaan kebijakan Bina Keluarga Balita (BKB) secara umum belum maksimal berjalan hal ini di karenakan dari segi sarana dan prasarana, media pembantu pengetahuan tentang tumbuh kembang anak dikatakan kurang, terlihat jelas dengan banyaknya orang tua/ keluarga balita yang termasuk sebagai peserta BKB lebih tertarik pada tempat tempat penitipan anak atau kelompok bermain yang tidak memiliki pola asuh yang seimbang dari pada melakukan konsultasi kepada petugas atau kader BKB (Djabbar 2018).

Sejalan dengan penelitian ertigo bagas menjelaskan bahwa Sarana prasarana BKB yang masih kurang seperti Alat Permainan Edukasi (APE) masih kurang pada setiap kelompok umur sehingga dalam praktek menjelaskan dan aplikasi bagi para balita masih belum maksimal. Dimana selama ini masih meminjam dari PAUD yang ada di Desa Nogosari (Mojokerto and Timur 2021).

Sejalan dengan penelitian tersebut, kelengkapan dari sarana dan prasarana sangat amat penting Hal tersebut sangat penting karena ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengembangkan anak secara optimal, misalnya dengan merangsang tumbuh kembang anak menggunakan Alat Permainan Edukasi (APE) dan memanfaatkan sarana lainnya yang ada.(Wahyuningsih, Wahyuni, and Widianto 2020).

Menurut asumsi peneliti, untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan bina keluarga balita diharapkan untuk kebutuhan terkait sarana dan prasarana lebih di lengkap kan kembali sehingga dengan lengkapnya kebutuhan sarana dan prasarana mampu menunjang keberhasilan kader dalam membina keluarga balita.

Proses

Perencanaan

Informan sudah melakukan perencanaan melalui kegiatan diskusi bersama kader dengan menjelaskan terkait kegiatan yang akan di lakukan serta strategi pelaksanaan nantinya yang mana di harapkan kader mampu memahami dari manfaat tugas pelaksanaan BKB.

Menurut Peraturan Kepala Bkbbn No 12 tahun 2018 menjelaskan tahap perencanaan adalah tahap yang dilakukan sebelum kegiatan BKB di laksanakan yang mana kegiatan terdiri dari persiapan jadwal dan peserta yang akan di hadiri, menyiapkan Anggaran pelaksanaan kegiatan, Menyiapkan materi pelatihan dan melakukan koordinir terkait pelaksanaan kegiatan dengan Mitra Kerja BKB.

Menurut Penelitian Santi Hariani(2019) menjelaskan bahwa perencanaan sudah dilakukan sejak awal tahun yaitu menyusun kerangka acuan yang mana di lanjutkan dengan menyusun kerangka acuan kerja dengan mengadakan pertemuan lintas sektor terkait pokjnal dalam melaksanakan kegiatan, perlunya pendekatan dalam pengambilan kebijakan dan terlibat dalam musrembang desa dalam penyusunan perencanaan (Hariani, Masrul, and Elytha 2019).

Menurut Asumsi peneliti, Untuk perencanaan sudah dilakukan dengan melibatkan pihak terkait dalam perencanaan yang mana dari pusat menyusun kerangka acuan kerja dan dari kecamatan sendiri mendiskusikan perencanaan terkait pelaksanaan di lapangan, yanag mana tujuan dilakukan perencanaan adalah menciptakan pelaksanaan kegiatan yang baik dan mampu dilaksanakan bersama hal ini agar kegiaatan bisa didiskusi bersama sama guna menciptakan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan. Hal ini sejalan dengan peneltiian yaitu kgiatan harus di laksanakan dengan mendiskusi kegiatan sebelum dilaksanakm baik bersama kader atau pihak nagari yang mana nantinya agar tidak menimbulkan masalah setelah kegiatan dilaksanakan.

Harapan di masa akan datang agar perencanaan yang sudah di tetapkan dapat di laksanakan sebaik mungkin sesuai dengan ketetapan yang ada, jika terdapat kendala maka diskusikan kembali bersama sama, dan bagi pihak yang belum memahami kinerja yang sudah direncanakan sehingga diharapkan mampu bertanya kembali agar disaat pelaksanaan kegiatan kita mampu memahami tugas dari masing masing kita dalam melaksanakan tugas yang diberikan tujuan dari kebijakan mampu kita lakukan bersama sama dengan bekerja sama yang baik di saat diskusi perencanaan agar kegiatan lebih matang dan mampu dilaksanakan semaksimal mungkin dengan rencana yang sudah di persiapkan sebelum kegiatan di lakukan nantinya.

Pengorganisasian

Untuk pengorganisasian kader BKB sudah sesuai peraturan yang mana satu kader memegang 1 kelompok umur, Kader juga terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

Pengorganisasian merupakan kegiatan menentukan, mengelompokkan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam dengan menetapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan. (Wiriana et al. 2020).

Menurut penelitian bahwa kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilihat dari sudut pandang pemerintah dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai elemen penggerak kelompok tribina diperoleh jumlah pelaksana program tribina di lapangan dapat dikatakan cukup, tidak berlebih namun tidak juga mengalami kekurangan. Akan tetapi, akan lebih baik jika kuantitas pengorganisasian kader sebagai pelaksana tersebut ditingkatkan agar tidak terjadi rangkap jabatan dan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi bagi kader lapangan yang ada saat ini. (Wiriana et al. 2020).

Sesuai dengan penelitian tersebut, BKB di Kelurahan Mentikan dalam menjalankan maupun merancang kegiatan BKB diatur setiap bulan oleh Kader atas pengawasan dari PLKB. Ada saatnya pelaksanaan kegiatan BKB menyinkronkan kegiatan Posyandu. Juga berkoordinasi dengan pihak Kecamatan. Semua pihak sudah sesuai tupoksinya masing-masing untuk mempermudah kegiatan. (Tafhamin and Widowati 2021).

Menurut asumsi peneliti, pengorganisasian petugas lapangan keluarga berencana sudah dikatakan cukup namun akan lebih baik untuk tugas masing kader lebih diperbaiki lagi sehingga diharapkan untuk tidak ada tumpang tindih pekerjaan disaat mereka melakukan kegiatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang di peroleh bahwa pembentukan kader sudah di sesuai dengan Sk yang ditetapkan di saat kader di lantik sebagai petugas dengan begitu kader di harapkan mampu bekerja secara maksimal tanpa melakukan tumpang tindih dalam melakukan tugas mereka sebagai kader BKB di kecamatan.

Implementasi

Untuk melaksanakan implementasi kebijakan yang baik kedepannya bisa memberikan motivasi dan menciptakan semangat baru pada kader BKB kendala dari pelaksanaan ini terkait kehadiran dari anggota yang di katakan masih sedikit.

Menurut hasil penelitian velly violita (2021) menjelaskan bahwa implmentasi kegiatan sudah sesuai dengan prosedur dari pelaksanaan

kegiatan yang pelaksanaan kegiatan BKB holistik ter integratif dengan Posyandu Dan PAUD sesuai dengan KAK, namun pelaksanaan ini masih di katakan belum maksimal dikarenakan tim pokjanal yang berjalan masing masing (Violita, Suryanti, and Anggreny 2021).

Sesuai dengan penelitian tersebut, Peran kader dalam pelaksanaan kegiatan bina keluarga balita salah satunya yaitu memberikan penyuluhan dan sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan bina keluarga balita dalam kelompok kegiatan. Sehingga dengan adanya dukungan dari kader ini membuat kebijakan mampu dilaksanakn sebaik mungkin (Husnawati, and Zulkarnaen 2020).

Menurut asumsi peneliti, untuk menciptakan implementasi kebijakan yang baik maka kita harus membangun motivasi semangat kerja petugas dalam melaksanakan tugas nya dengan memberikan pelayanan yang baik dengan reward dalam menghargai kinerjanya dan juga menjalin kerja sama yang baik antara petugas lainnya guna memperbaiki kinerja implementasi kebijakan yang baik kedepannya. Pelaksana kegiatan sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan. implementasi dengan melakukan kegiatan mulai pelatihan yang dilakukan kepada kader petugas dan ibu balita, berikan program yang bisa menarik masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut.

Monitoring

Kegiatan yang dilakukan dinas biasanya memantau melalui laporan kegiatan rutin yang diberikn berupa laporan bulanan dan hasil dari pengisian KKA yang diisi setiap kegiatan.

Menurut Teori monitoring, Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan kearah tujuan atau menjauh dari itu.

Berdasarkan hasil penelitian santi hariani (2019) dalam melakukan feedback langsung dilapangan kita harus melakukan monitoring namun kegiatan ini hanya dilakukan oleh tim Pokjanal Kota dan tidak dilaksanakan oleh pokjanal kecamatan dan desa. Perlunya

pembinaan berkesinambungan dari Pokjanal provinsi, kota, kecamatan dan desa agar pelaksanaan program berjalan dengan kualitas yang diharapkan (Hariani, Masrul, and Elytha 2019).

Menurut asumsi peneliti untuk bisa melaksanakan kegiatan monitoring maka hal yang dilakukan sebaiknya memantau kinerja petugas di lapangan sehingga bisa dilihat bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut apakah ada kesalahan dan kekurangan dari pelaksanaan, dengan begitu kegiatan monitoring bisa dikatakan bermanfaat di laksanakan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan.

Evaluasi

Dari hasil evaluasi dari kegiatan yang dilakukan di peroleh masih kurangnya dukungan yang dimiliki oleh kader dalam melaksanakan kegiatan baik dari pembinaan, serta anggaran yang di butuhkan kader dalam melaksanakan kegiatan.

Menurut penelitian santi hariani(2019) menyebutkan hasil evaluasi bahwa kegiatan BKB masih belum memenuhi target hal ini disebabkan oleh pemahaman kader BKB yang masih rendah, terbatasnya jumlah kader BKB dan pengelola BKB serta keterlambatan pengiriman laporan R/II/BKB ke petugas lapangan serta masih kurangnya dokumentasi dan pelaporan kegiatan BKB holistik terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD. (Hariani, Masrul, and Elytha 2019).

Seiring dengan penelitian tersebut, Evaluasi outcome dijadikan dasar untuk mengetahui keberadaan hasil program maupun sebagai dasar untuk memperbaiki proses pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan evaluasi keluaran ini selalu dikaitkan dengan sejauhmana dampak dari program hal ini di tandai dengan terciptannya orang tua yang kreatif dalam melakukan pola asuh yang benar dan adanya peningkatan jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut (Islamiyah, Awad, and Anhusadar 2020).

Seiring dengan penelitian diatas menjelaskan bahwa Berkenaan dengan evaluasi, Kegiatan evaluasi sendiri dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sekali ataupun

tiga bulan sekali dengan tugas yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara langsung turun ke lapangan secara langsung dan bertahap sesuai penjangkauan wilayah kerja (Wiriana et al. 2020).

Berdasarkan hasil penelitian berbeda menjelaskan bahwa Hasil penelitian menunjukkan menganalisis kriteria evaluasi pelaksanaan program bina keluarga balita (BKB) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Balita Umur 2 tahun – 3 tahun) dikategorikan dengan cukup terlaksana (Listianor Fitri 2020).

Menurut asumsi peneliti menjelaskan bahwa Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan bina keluarga balita ini terkait kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga balita karena tidak adanya pelatihan bagi kader hal ini di karenakan kurangnya dana yang dimiliki untuk pelaksanaan bina keluarga balita sehingga untuk melakukan pembinaan terhadap kader terhambat.

Untuk melakukan kegiatan biasanya evaluasi dilakukan setiap sebulan sekali sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan namun untuk sekarang evaluasi kegiatan di lakukan oleh dinas hanya bisa dihitung 3 kali sebulan hal ini dikarenakan jauhnya cakupan wilayah kerja dinas pengendalian penduduk keluarga berencana kabupaten agam yang dikatakan luas sehingga jika dilakukan kegiatan evaluasi secara langsung ke lapangan akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pelaksanaannya, sehingga di harapkan mampu ditasi kedepannya dengan evaluasi evaluasi yang lebih mendukung kegiatan kita kedepannya.

Output

Kebijakan bina keluarga balita sudah pernah dijalankan dan dikatakan sudah berjalan dengan baik sebelum pandemi namun setelah pandemi saat ini kebijakan dikatakan non aktif atau tidak berjalan secara maksimal hal ini di karenakan beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai tujuannya.

Menurut hasil penelitian menjelaskan bahwa Capaian Kelompok BKB Aktif dan Keluarga Aktif ikut Kegiatan BKB masih belum

memenuhi target dapat dilihat dari laporan Bidang Dalduk Dinas PPKBP3A untuk jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita) masih di katakan rendah hal ini di karenakan masih rendahnya pengetahuan tentang penting bina keluarga balita untuk di terapkan hal ini baik dukungan dari kader, keluarga balita terkait pelaksanaan kegiatan (Violita, Suryanti, and Anggreny 2021).

Sejalan dengan peneltian volita menjalaskan bahwa Keberhasilan dari adanya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aktualisasi di lapangan berkenaan dengan kompetensi dan kognisi sumber daya pelaksana yang rendah, sumber daya anggaran yang minim serta komunikasi dan keterlibatan lintas sektor yang berjalan tidak secara terorganisir dan terlembagakan. Sehingga, perlunya pembinaan berkala sebagai tindak lanjut keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten (Wiriana et al. 2020).

Penelitian yang sama menjelaskan Hasil penelitian ini yaitu proses program kampung KB pada kelompok sasaran Bina Keluarga Balita di RW X Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan BKB yang dikelola oleh Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2018 tentang pengelolaan BKB Holistik Integratif (Rinah, Karim, and Pramita 2020).

Penelitian berbeda menjelaskan bahwa output dari implementasi kebijakan menjelaskan bahwa Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan program BKB di Desa Nogosari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan program sudah berjalan dengan baik setelah 7 bulan .

Menurut asumsi peneliti terkait output dari pelaksanaan kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan dari orang tua atau keluarga balita dalam mengatur pola asuh balita sehingga untuk tumbuh kembang anak bisa di pantau melalui kegiatan bina keluarga balita. Untuk pelaksanaan kegiatan sendiri sudah berjalan namun tidak berjalan maksimal sesuai dengan peraturan hal ini di karenakan faktor penghambat baik dari segi sumber daya manusia yang terlatih dan mampu memiliki pengetahuan

terkait pola asuh keluarga yang masih kurang, Hal ini karena tidak adanya pembinaan terkait pelatihan kader BKB sehingga belum mampu menimbulkan motivasi kerja dalam melaksanakan kegiatan.

Diharapkan unuk membuatkan inovasi ke masyarakat dan petugas dan kader agar program berjalan dengan baik. Penelitian yang sama menjelaskan Hasil penelitian ini yaitu proses program kampung KB pada kelompok sasaran Bina Keluarga Balita di RW X Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan BKB yang dikelola oleh Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2018 tentang pengelolaan BKB Holistik Integratif. (Rinah et al., 2020)

SIMPULAN

Dilihat dari segi input meliputi Kebijakan, Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana Prasarana dijelaskan bahwa kebijakan terkait BKB ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, terkait sumber daya manusia yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di katakan kurang hal ini di karenakan untuk dana pelaksanaan kegiatan serta honor untuk membayar kader yang tidak ada, hal lain terkait sarana dan prasarana kegiatan menjelaskan bahwa sarana prasarana BKB yang di miliki kelompok BKB jumlah nya belum memadai dan untuk sarana yang terbaru terkait BKB ini belum di peroleh oleh beberapa kelompok BKB yang ada di kecamatan . Dilihat dari segi proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, implementasi monitoring dan evaluasi. Perencanaan sudah dibuat sudah melibatkan seluruh petugas terkait dengan penentuan pengorganisasian sudah di sesuaikan dengan fungsi dan kemampuan masing maisng kader, sehingga di saat pelaksanaan hal yang mungkin menjadi kendala tingkat kehadiran dari keluarga balita yang masih rendah yang mana kegiatan ini di pantau melalui monitoring langsung oleh petugas lapangan keluarga berencana dengan memberikan laporan kegiatan kepada seksi ketahanan keluarga guna di laporkan pelaksanaannya ke kepla bidang kb. Dilihat dari



segi output, secara umum kegiatan sudah mulai dijalankan kembali sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2018 namun hal ini terkendala terkait sumber daya manusia terlatih yang kurang serta Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan bina keluarga balita yang masih kurang sehingga untuk pelaksanaana dikatakan belum berjalan maksimal sesuai harapan dan tujuan dari Kebijakan Bina Keluarga Balita.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Universitas fort de kock yang telah membantu dalam penelitian dan kepada Tim penelitian dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam peneliian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2016). Buku Panduan Penyuluhan BKB Holistik Integratif Bagi Kader. *Direktorat Bina Keluarga Dan Anak*, 1–123.
- Yulia Suarni, and S U Wikaningtyas. 2021. “Efektifitas Peran Kader Di Kelompok Kegiatan Bkb Melati 9 Rw 9 Kelurahan Warungboto Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.” *Eprint.Stieww.Ac.Id*, 196–212.
<http://eprint.stieww.ac.id/id/eprint/1752>.
- Rinah, S. A., Karim, Z. A., & Pramita, N. A. (2020). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Bina Keluarga Balita di RW X Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 314–329.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Barat . (2017). Data Pengendalian Lapangan (Dalap BKKBN) keluarga yang mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). Sumatera Barat : BKKBN..
- Djabbar, Ramlawati. 2018. “Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (Bkb) Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara,” no. BKB: 1–94..
- Hariani, Santi, Masrul Masrul, and Fauziah Elytha. 2019. “Analisis Kebijakan Program Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Terintegrasi Dengan Posyandu Dan PAUD Di Kota Sawahlunto Tahun 2016.” *Jurnal Kesehatan Andalas* 8 (1): 138.
<https://doi.org/10.25077/jka.v8i1.982>.
- Islamiyah, Islamiyah, Faizah Binti Awad, and Laode Anhusadar. 2020. “Outcome Program Bina Keluarga Balita (Bkb): Konseling Orang Tua Dalam Tumbuh Kembang Anak Usia Dini.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6 (1): 38.
<https://doi.org/10.31332/zjpi.v6i1.1797>.
- Larasati, Diah Wahyu. 2011. “Peran Penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB) Terhadap Orang Tua Dalam Mengembangkan Akhlak Anak Di BKB An-Nur Rw. 08 Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat.” Skripsi Jakrta: Un.
- Listianor Fitri, Budi Setiawati. 2020. “KRITERIA EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BINA KELUARGA Bina Keluarga Balita (BKB) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Keluarga Balita (BKB) Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten” 3: 1180–94.
- Mojokerto, Asdaf Kabupaten, and Jawa Timur. 2021. “Implementasi Program Bina Keluarga Balita .”
- Munawar, Eddy, and Gema Novi Renggina. 2021. “Strategi Pengaktifan Kelompok Bina Keluarga Balita Pada Kampung Keluarga Berencana.” *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 4 (1): 1–9.
- Pratama, Diana. 2017. “dampak partisipasi orang tua dalam kegiatan bina keluarga balita terhadap proses stimulasi tumbuh kembang balita.”
- Resti Fauziah, Nandang Mulyana, Santoso Tri Raharjo. 2006. “Efektifitas Program Bina Keluarga Balita.” *Efektifitas Program Bina Keluarga Balita 1999 (December)*: 1–6.
- Rezillah, Artika Ameliani, Mukarto Siswoyo, and Hery Nariyah. 2018. “Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita Perlindungan Anak , Pengendalian

LLDIKTI Wilayah X



Penduduk Dan Keluarga Berencana
(Dp3Kb) Kecamatan Banjarharjo

Kabupaten Brebes.” Jurnal Publika
Unswagati Cirebon 6 (1): 1–14.

